

KEMAJUAN PEKEMPUAN: BEBERAPA ASPEK KEPENDUDUKAN DAN SOSIAL BUDAYA

*Masri Singarimbun**

Abstract

The Indonesian women have achieved substantial progress over the last few decades and their participation in education, family planning, the labour force, and public life is relatively high by Asian standards. Literacy of women has increased from 50.3 percent in 1971 to 78.6 percent in 1990; total fertility rates dropped from 5.6 in 1971 to 3.1 in 1991; infant mortality dropped from 143 in 1971 to 70 in 1985; female labour participation rates increased from 32.7 percent in 1980 to 39.2 percent in 1990; the ratio of male to female civil servants dropped from 3.6 in 1978 to 2.1 in 1990. The ratio of male to female member of parliament in Indonesia is lower than Singapore, Malaysia, USA, and Japan. However, many problems should be overcome before Indonesian women become fully integrated in national life.

Pada dekade-dekade terakhir ini terdapat kemajuan-kemajuan dalam berbagai segi kehidupan perempuan Indonesia. Dari sudut kependudukan, hal yang menggembirakan adalah menurunnya tingkat fertilitas secara mantap berkat program keluarga berencana yang sukses, ditopang oleh kemajuan sosial ekonomi dan peran perempuan yang besar. Seiring dengan itu, tingkat kematian bayi juga menurun secara drastis dan mantap, yang mencerminkan kemajuan sosial ekonomi Indonesia. Di samping itu tingkat pendidikan perempuan juga terus mengalami kemajuan, begitu juga tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Variabel-variabel tersebut kait-mengait dan berkaitan pula dengan nilai-nilai sosial budaya.

Di dalam tulisan ini akan dibahas tentang kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam pendidikan, keluarga

berencana dan penurunan fertilitas, penurunan mortalitas, ketenagakerjaan perempuan, dan beberapa segi sosial budaya.

Pendidikan

Menciuatnya persentase penduduk yang buta huruf merupakan indikator penting dari kemajuan pendidikan. Dari tahun 1971 ke tahun 1980 dan seterusnya ke tahun 1990 terdapat kenaikan proporsi yang melek huruf secara mantap baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan (Tabel 1.). Pada tahun 1971, 1980 dan 1990 laki-laki yang melek huruf berturut-turut adalah 72,1 persen, 79,8 persen dan 89,7 persen; untuk perempuan berturut-turut 50,3 persen, 62,7 persen dan 78,6 persen.

Itu artinya, dalam hal proporsi yang melek huruf, perbedaan antara laki-laki dan perempuan mengecil dari sensus

* Masri Singarimbun, PhD adalah staf peneliti Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan dosen jurusan Antropologi Fakultas Sastra UGM.

TABEL 1.
PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG DAPAT MEMBACA DAN MENULIS
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 1971, 1980, DAN 1990 (%)

Golongan Umur	Laki-laki			Perempuan		
	1971	1980	1990	1971	1980	1990
10 - 14	83,2	90,6	97,5	79,1	89,2	97,6
15 - 19	86,6	90,1	97,8	77,9	83,8	96,9
20 - 24	86,8	88,8	96,7	69,4	79,2	93,0
25 - 29	81,2	86,6	94,3	55,1	74,3	86,9
30 - 34	74,2	83,6	91,7	40,8	64,8	83,0
35 - 39	65,8	80,2	90,1	33,4	53,2	78,8
40 - 44	60,1	72,6	86,6	26,4	40,4	69,0
45 - 49	57,2	65,6	84,1	22,8	33,7	60,4
50 +	42,8	53,2	69,0	12,5	20,0	38,8
Indonesia	72,1	79,8	89,7	50,3	62,7	78,6

Sumber: BPS, 1991c: 32

TABEL 2.
PENDUDUK PEREMPUAN BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG PERNAH SEKOLAH
MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN

	1980		1990	
	(000)	%	(000)	%
Tidak/belum tamat SD	20 260	59,6	21 410	40,0
Sekolah Dasar	9 536	28,1	19 552	36,5
SLTP	2 478	7,3	6 489	12,1
SLTA	1 573	4,6	5 530	10,3
Akademi/Universitas	127	0,4	599	1,1

Sumber: BPS, 1983 dan 1991

penduduk yang satu ke sensus berikutnya. Apabila dilihat populasi usia muda pada tahun 1990 mengecilknya perbedaan berdasarkan jenis kelamin tersebut jelas kelihatan. Pada golongan umur 10-14 tahun laki-laki yang melek huruf sebesar 97,5 persen, sedangkan perempuan 97,6 persen; selisihnya jauh lebih kecil daripada sebelumnya. Pada kelompok umur yang lebih tinggi

selisihnya semakin besar tetapi masih relatif kecil pada golongan umur 20-24 tahun.

Sejalan dengan kemajuan pendidikan tersebut, penguasaan terhadap bahasa Indonesia juga mengalami kemajuan. Pada tahun 1980 yang dapat berbahasa Indonesia adalah sebanyak 66,4 persen laki-laki dan 56,4 persen perempuan; pada tahun 1990

angka-angka tersebut melonjak menjadi 86,8 persen untuk laki-laki dan 78,6 persen untuk perempuan (BPS, 1991c: 41).

Tabel 2. menunjukkan bahwa terdapat kemajuan yang pesat berdasarkan pendidikan yang ditamatkan. Pada tahun 1990 jumlah perempuan yang tamat sekolah dasar dua kali lipat lebih banyak dari tahun 1980, dari 9,5 juta menjadi 19,5 juta. Lonjakan yang sama terdapat pada tamatan SLTP dan malahan lebih melonjak lagi pada tamatan SLTA dan Akademi/Perguruan Tinggi.

Selanjutnya, menurut Tan (1991: xii) pada perguruan tinggi perempuan cenderung menjadi mayoritas pada fakultas-fakultas hukum, sastra, psikologi, pendidikan luar biasa, dan kedokteran. Sebaliknya mereka menjadi minoritas dalam bidang-bidang teknologi, kehutanan, dan ilmu-ilmu sosial.

Keluarga Berencana dan Fertilitas

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), yang penelitian lapangannya diadakan pada Mei-Juli 1991, menunjukkan bahwa cakupan kontrasepsi untuk seluruh Indonesia

TABEL 3.
PERSENTASE PASANGAN USIA SUBUR YANG MENGGUNAKAN KONTRASEPSI
MENURUT DAERAH, 1987 DAN 1991

	Indonesia			Jawa-Bali 1991	LJB	LJB
	1991	1987*	1991*		I 1991	II 1991
Semua Metode	49,7	47,7	50,3	53,3	43,5	42,8
Semua Metode Modern	47,1	44,0	47,8	51,1	40,3	39,3
Pil	14,8	16,1	15,0	14,4	16,1	14,0
IUD	13,4	13,2	13,7	16,1	8,8	8,2
Injeksi	11,7	9,4	11,9	12,9	9,4	10,1
Kondom	0,8	1,6	0,8	0,8	0,7	0,8
Norplant	3,1	0,4	3,1	3,1	2,7	4,0
Tubektomi	2,7	3,1	2,8	2,9	2,6	1,7
Vasektomi	0,6	0,2	0,5	0,7	0,1	0,6
Semua Metode Tradisional	2,6	3,7	2,6	2,3	3,1	3,5
Pantang Berkala	1,1	1,2	1,1	1,0	1,1	1,4
Sanggama Terputus	0,7	1,3	0,7	0,5	1,0	0,6
Cara Lainnya	0,8	1,2	0,8	0,7	0,9	1,6
Tidak Menggunakan	50,3	52,3	49,7	46,7	56,5	57,2
Total		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Jumlah		21108	10907	19597	13418	5299

Sumber: Central Bureau of Statistics et al., 1991

* Tidak termasuk Jambi, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, Irian Jaya

adalah sebesar 49,7 persen untuk semua cara kontrasepsi, termasuk cara-cara tradisional seperti pantang berkala, sanggama terputus dll. Apabila dibatasi pada pemakaian cara-cara kontrasepsi modern, maka cakupannya adalah sebesar 47,7. (Lebih rendah dari hasil pelaporan BKKBN dengan cakupan kontrasepsi sebesar 59,9 pada 1990). Hasil temuan pada tahun 1991 tersebut sejalan dengan hasil National Indonesia Contraceptive Prevalence Survey (NICPS atau SPI, 1987) yang menunjukkan cakupan semua kontrasepsi sebesar 47,7 dan cakupan kontrasepsi modern sebesar 44,0 persen (Tabel 3.). Ke dalam survei tahun 1987 tidak dimasukkan Jambi, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Irian Jaya. Sebanyak 55,7 persen dari akseptor (1991) tidak menginginkan tambahan anak lagi.

Cakupan kontrasepsi modern tertinggi adalah di Jawa dan Bali (51,1 persen), disusul oleh Luar Jawa Bali I (LJB I, 40,3 persen) dan Luar Jawa Bali II (LJB II, 39,3 persen). Selanjutnya, pemakaian Metode Kontrasepsi Efektif Terpilih (MKET) -- IUD dan sterilisasi --

yang tertinggi adalah di Jawa dan Bali; selanjutnya LJB I dan LJB II.

Sebaliknya, dari sudut pemakaian cara-cara tradisional, pemakaian tertinggi adalah di LJB II (3,5 persen), selanjutnya LBJ I (2,1 persen) dan Jawa Bali (2,3 persen). Menarik perhatian bahwa ternyata akseptor pantang berkala lebih tinggi daripada kondom. Di Jawa Bali, LBJ I dan LBJ II berturut-turut memakai pantang berkala adalah 1 persen, 1,1 persen, dan 1,4 persen, sedangkan pemakai kondom adalah 0,8 persen, 0,7 persen dan 0,8 persen.

Penelitian ini menunjukkan pula bahwa status pendidikan mempunyai korelasi yang positif dengan tingkat pemakaian kontrasepsi. Untuk semua cara kontrasepsi pemakai (perempuan berstatus kawin) tertinggi adalah yang pernah duduk di SMTP ke atas (59,3 persen), selanjutnya yang tamat SD (54,4 persen), pernah SD (47,3 persen) dan tidak pernah sekolah (36,6 persen).

Berdasarkan distribusi pemakaian kontrasepsi maka jelas terlihat bahwa partisipasi pria tidak seberapa. Dari tahun ke tahun sejak program keluarga berencana dilaksanakan pada tahun

TABEL 4.
AGE SPECIFIC FERTILITY RATE (ASFR) DAN TOTAL FERTILITY RATE (TFR),
SP 1971 DAN 1980, SUPAS 1976 DAN 1985, SPI 1987 DAN SDKI 1991

Umur	1971	1976	1980	1985	1987*	1991
15 - 19	155	127	116	95	78	42
20 - 24	286	265	248	220	188	146
25 - 29	273	256	232	206	172	162
30 - 34	211	199	177	154	126	133
35 - 39	124	118	104	89	75	90
40 - 44	55	57	46	37	29	42
45 - 49	17	18	13	10	10	11
TFR 15-49	5,605	5,200	4,680	4,055	3,390	3,127

Sumber: Central Bureau of Statistics at al: 1991: 23

Catatan: * Tidak termasuk tujuh propinsi di LJB II

1969, cara-cara kontrasepsi yang dipakai adalah terutama untuk perempuan. Cara-cara kontrasepsi yang utama adalah IUD, Pil, dan Suntikan; sterilisasi jauh lebih banyak dilaksanakan oleh wanita (tubektomi) daripada oleh laki-laki (vasektomi) walaupun operasi laki-laki jauh lebih sederhana dibandingkan dengan operasi perempuan.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta peranan pria pernah cukup penting dalam keluarga berencana karena akseptor kondom cukup banyak tetapi pelaksana program berusaha supaya terjadi konversi dan terjadilah peralihan ke spiral. Di dalam program dibuat penekanan kepada Metode Kontrasepsi Efektif Terpilih (MKET) yakni IUD, sterilisasi, dan Norplant, semuanya itu adalah cara-cara perempuan, kecuali vasektomi. Jadi dari sudut teknologi kontrasepsi dewasa ini memang jauh lebih banyak pilihan dalam cara-cara kontrasepsi perempuan dibandingkan dengan cara-cara laki-laki. Di samping itu pada umumnya perempuan mempunyai motivasi yang lebih tinggi dalam berkontrasepsi karena mereka lebih langsung terkena oleh masalah-masalah reproduksi dan perawatan anak.

Survai di atas (SDKI, 1991) menunjukkan bahwa Total Fertility Rate (TFR) untuk Indonesia adalah sebesar 3,1. Pada tahun 1971 TFR adalah sebesar 5,6, jadi sudah terjadi penurunan sebesar 44 persen. Selanjutnya, TFR pada tahun 1980 adalah 4,7 dan pada Supas 1985 sebesar 4,1.

Perbandingan tingkat fertilitas antardaerah untuk 1991 menunjukkan bahwa Jawa-Bali mempunyai TFR 2,8, LBJ I 3,6 dan LBJ II 3,8. Perincian untuk Jawa-Bali adalah Jakarta 2,1, Jawa Barat 3,6, Jawa Tengah 2,9, Daerah Istimewa Yogyakarta 2,1, Jawa Timur 2,2 dan Bali

2,3. Jadi untuk Jawa-Bali, DI Yogyakarta mempunyai TFR terendah dan Jawa Barat tertinggi.

Mortalitas

Berbeda dengan upaya penurunan fertilitas melalui upaya praktik keluarga berencana, yang sering mengalami rintangan-rintangan sosial budaya, upaya untuk menurunkan tingkat kematian pada prinsipnya tidak menghadapi rintangan tersebut. Terdapat berbagai norma yang mungkin menghalangi atau menghambat usaha pencegahan kehamilan tetapi upaya mencegah kematian disambut secara positif. Hal yang sering menghambat usaha tersebut adalah kebiasaan dan kepercayaan yang tidak disadari mengakibatkan kematian, seperti cara-cara tradisional yang mengakibatkan infeksi dan kemudian menyebabkan kematian.

Penyebab kematian yang utama bagi bayi (umur 0-11 bulan) berturut-turut adalah tetanus, gangguan perinatal dan diare. Untuk kematian anak (umur 1-4 tahun) penyebab kematian yang utama adalah berturut-turut diare, infeksi saluran pernafasan bagian atas (ISPA) dan campak (Budiarsa, 1988: 197).

Tingkat kematian bayi dianggap merupakan pencerminan tingkat kesehatan penduduk secara umum. Indonesia mengalami tingkat penurunan kematian bayi yang cukup pesat sejak tahun 1971 sampai sekarang. IMR diperkirakan sebesar 143 pada tahun 1971, menurun menjadi 107 pada tahun 1980, dan 70 pada tahun 1985. Dalam periode 15 tahun IMR mengalami penurunan lebih dari 50 persen, jadi lebih drastis lagi dari penurunan tingkat fertilitas untuk periode yang sama.

Secara konsisten tingkat kematian bayi untuk anak perempuan lebih

TABEL 5.
TINGKAT KEMATIAN BAYI PER 1000 KELAHIRAN
MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROPINSI, 1980 DAN 1985

Propinsi	1980		1985	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1. DI Aceh	98,8	82,0	68,9	55,2
2. Sumatra Utara	97,5	80,9	69,9	56,1
3. Sumatra Barat	132,4	112,1	92,7	76,5
4. Riau	122,6	103,4	83,2	68,0
5. Jambi	129,6	109,6	85,0	69,6
6. Sumatra Selatan	106,4	88,9	76,0	61,6
7. Bengkulu	115,6	97,1	71,1	57,3
8. Lampung	106,4	88,9	66,9	53,5
9. DKI Jakarta	88,7	73,0	45,0	34,3
10. Jawa Barat	141,0	119,7	90,6	74,6
11. Jawa Tengah	106,4	88,9	71,3	57,4
12. DI Yogyakarta	69,9	56,1	42,3	32,0
13. Jawa Timur	108,9	91,1	76,0	61,6
14. Bali	97,9	80,9	65,1	51,9
15. NTB	202,0	173,0	124,1	105,1
16. NTT	135,2	114,0	87,4	71,7
17. TimTim	-	-	106,6	89,1
18. Kal. Barat	126,8	107,1	85,3	69,9
19. Kal. Tengah	108,9	91,1	76,3	61,8
20. Kal. Selatan	132,4	100,4	91,6	75,5
21. Kal. Timur	108,9	91,1	71,1	57,3
22. Sul. Utara	103,8	86,6	72,8	58,7
23. Sul. Tengah	139,4	118,3	102,5	85,3
24. Sul. Selatan	117,0	98,4	74,6	60,3
25. Sul. Tenggara	126,8	107,1	81,9	66,8
26. Maluku	135,8	114,6	93,5	77,2
27. Irian Jaya	117,0	98,4	90,0	74,1
INDONESIA		117,0	98,4	73,7

Sumber: BPS, 1991b

rendah daripada anak laki-laki. Tabel 5. menunjukkan bahwa untuk tahun 1980 tingkat kematian bayi untuk laki-laki sebesar 117 dan untuk perempuan 98,4. Pada tahun 1985 tingkat kematian bayi untuk anak laki-laki 78,3, sedangkan untuk anak perempuan 69,5.

Tingkat kematian bayi antarpropinsi mempunyai variasi yang besar. Baik pada tahun 1980 maupun tahun 1985 Daerah Istimewa Yogyakarta tetap

mempunyai tingkat kematian bayi yang terendah. Sebaliknya Nusa Tenggara Barat tetap mempunyai tingkat kematian tertinggi. Menarik perhatian bahwa tingkat kematian bayi lebih rendah di Daerah Istimewa Yogyakarta dari pada DKI Jakarta.

Perbedaan tingkat kematian bayi antara laki-laki dan perempuan merefleksikan perbedaan tersebut secara umum. Harapan hidup (pada

TABEL 6.

PEREMPUAN BERUMUMUB 10 TAHUN KE ATAS YANG BERERJA SELAMA SEMINGGU YANG LALU
MENURUT JENIS PEKERJAAN UTAMA 1980 DAN 1990 (%)

	1980	1990
1. Tenaga prof. teknisi dan yang sejenis	3,30	4,48
2. Tenaga kepemimpinan & ketatalaksanaan	0,03	0,06
3. Tenaga tata usaha dan tenaga yang sejenis	1,44	2,94
4. Tenaga usaha penjualan	18,89	20,32
5. Tenaga usaha jasa	6,76	6,86
6. Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan	54,25	49,10
7. Tenaga produksi, operator alat angkutan, pekerja kasar	15,22	16,21
8. Lainnya	0,10	0,02

Sumber: BPS: 1983 dan 1991d

waktu lahir) bagi perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Untuk Indonesia harapan hidup pada tahun 1980 adalah 50,9 bagi laki-laki dan 54 bagi perempuan; pada tahun 1985 meningkat menjadi 58,3 bagi laki-laki dan 61,7 bagi perempuan.

Tingkat kematian maternal tidak diketahui dengan baik karena proporsi terbesar ibu melahirkan melalui dukun, tetapi tampaknya sangat tinggi. Berdasarkan data yang ada diperkirakan 40 kematian maternal per 10.000 kehamilan dan di pedesaan mencapai 80 kematian per 10.000 kehamilan. Angka tersebut kira-kira delapan kali lebih besar dari negara-negara maju (Central Bureau of Statistics and Unicef, 1984: 42).

Perempuan dalam Angkatan Kerja

Dalam kurun waktu satu dekade, dari tahun 1980 ke tahun 1990, penduduk Indonesia bertambah sebanyak 21,58 persen, yakni dari 147,5 juta menjadi 179,3 juta. Sementara itu, angkatan kerja bertambah besar baik secara absolut

maupun relatif terhadap pertumbuhan penduduk.

Dari tahun 1980 ke tahun 1990, angkatan kerja bertambah dari 52,4 juta menjadi 74,4 juta, yakni pertambahan sebesar 41,92 persen. Di dalam proses itu kenaikan angkatan kerja perempuan lebih cepat daripada laki-laki. Bagi perempuan terjadi kenaikan dari 17,3 juta pada tahun 1980 menjadi 26,8 juta pada tahun 1990, yakni sebesar 54,98 persen sedangkan angkatan kerja laki-laki hanya bertambah sebesar 35,47 persen, dari 35,1 juta menjadi 47,5 juta.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan naik dari 32,65 pada tahun 1980 menjadi 39,21 pada tahun 1990. Untuk periode tersebut TPAK laki-laki naik dari 68,4 menjadi 71,2. Apabila diurutkan tinggi rendahnya TPAK, maka yang terendah adalah Perempuan Kota, dan selanjutnya yang lebih tinggi adalah Perempuan Desa, lalu Laki-laki Kota dan yang tertinggi Laki-laki Desa; urut-urutannya untuk tahun 1980 dan 1990 adalah 24,09 dan 31,89 (Perempuan Kota), 34,90 dan 42,63 (Perempuan Desa), 58,94 dan 63,57

(Laki-laki Kota) dan 70,91 dan 74,74 (Laki-laki Desa). TPAK di pedesaan lebih tinggi daripada di perkotaan dan ini berkaitan dengan kenyataan bahwa tenaga kerja dengan mudah dapat diserap di bidang pertanian dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan di kota yang lebih banyak memerlukan persyaratan.

Kiranya kemajuan pendidikan dan kemajuan sosial lainnya, termasuk perbaikan transportasi dan meningkatnya aspirasi, turut mempengaruhi perubahan dalam TPAK tersebut. Kecuali perubahan secara kuantitatif tersebut, bagi pekerja-pekerja perempuan terdapat pula kemajuan-kemajuan secara kualitatif.

Tabel 6. menunjukkan bahwa terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti di dalam jenis pekerjaan utama bagi perempuan. Tenaga profesional, teknisi, dan yang sejenis meningkat dari 3,30 persen (553 913) menjadi 4,48 persen (1 138 689) dari tahun 1980 ke tahun 1990. Secara absolut terjadi kenaikan dua kali lipat. Demikian juga perempuan yang bekerja sebagai tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan meningkat dari 0,03 persen (5 470) menjadi 0,06 persen (15 522), suatu

kenaikan yang mendekati tiga kali lipat secara absolut.

Walaupun secara absolut meningkat jumlahnya, tetapi proporsi perempuan yang bekerja sebagai tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuhan dan perikanan menurun. Proporsi tenaga untuk kategori-kategori lainnya juga mengalami kenaikan, terutama tenaga tata usaha dan tenaga yang sejenis.

Pergeseran tersebut seiring dengan perubahan yang terjadi menurut lapangan pekerjaan utama. Dari tahun 1980 ke tahun 1990, proporsi perempuan yang bekerja pada sektor pertanian berkurang dari 53,79 persen menjadi 48,13 persen, pada sektor industri meningkat dari 13,00 persen menjadi 14,74 persen, dan pada sektor jasa dari 32,43 persen menjadi 34,97 persen.

Kiranya perubahan jumlah dan proporsi perempuan sebagai pegawai negeri juga cukup berarti. Dari pegawai negeri yang berjumlah 3.771.285 orang pada Maret 1990, sebanyak 1.226.861 orang (32,5 persen) adalah perempuan (Tabel 8.). Perkembangan jumlah dan proporsi pegawai negeri perempuan termasuk cukup cepat apabila diingat bahwa 12 tahun sebelumnya (Maret

TABEL 7.
PENDUDUK YANG BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA SELAMA
SEMINGGU YANG LALU MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA 1980 DAN 1990 (%)

	1980		1990	
	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Laki-laki (%)	Perempuan (%)
Pertanian	56,98	53,79	50,44	48,13
Industri	13,25	13,00	17,76	14,74
Jasa	29,26	32,43	31,75	34,97

Sumber: BPS, 1983: 291 dan 1991: 154-155

TABEL 8.
BANYAKNYA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA
MENURUT KEPANGKATANNYA, 1978 DAN 1989

Gol.	Maret 1978			Maret 1990		
	Laki-laki	Perempuan	Rasio	Laki-laki	Perempuan	Rasio
I	570 461	93 474	6,1	531 428	78 305	6,8
II	643 148	268 327	2,4	1 548 914	986 333	1,6
III	87 044	15 552	5,6	431 740	158 269	2,7
IV	7 829	593	13,2	29 847	3 653	8,2
Non PGPS	71 333	2 658	26,8	2 495	301	8,3
Jumlah	1 379 815	380 604	3,6	2 544 424	1 226 861	2,1

Sumber: Biro Pusat Statistik, 1978 dan 1991a

TABEL 9.
RATA-RATA UPAH PERKEBUNAN PER HARI
MENURUT JENIS KELAMIN DAN JENIS PEKERJAAN, 1987

	Perempuan	Laki-laki	Rasio
Panen	1 515	1 980	76,5
Pemilihan (<i>sorting</i>)	1 305	2 039	64,0
Pengolahan	1 411	2 188	64,5
Semua pekerjaan	1 481	2 027	73,1

Sumber: Biro Pusat Statistik: *Statistik Indonesia*, 1989: 71

1978) pegawai negeri perempuan baru berjumlah 380.604 atau 21,62 persen dari pegawai negeri yang berjumlah 1.379.815 orang. Jadi dalam waktu 12 tahun jumlah pegawai negeri perempuan naik tiga kali lipat.

Dalam hal jenjang golongan, kedudukan laki-laki lebih baik daripada perempuan. Pada tahun 1990 dari seluruh pegawai negeri, sebanyak 623 509 atau 16,3 persen adalah golongan III dan IV. Apabila dipecah berdasarkan jenis kelamin maka laki-laki sebanyak 12,2 persen dan perempuan 4,3 persen

yang menduduki golongan III dan IV, hampir tiga berbanding satu.

Namun demikian, terdapat kemajuan-kemajuan dari pihak perempuan. Kalau pada tahun 1978 rasio golongan III dan IV antara pegawai negeri laki-laki dan perempuan adalah 5,9, maka pada tahun 1990 rasio tersebut sudah menurun menjadi 2,8. Seperti terlihat dalam Tabel 7., rasio untuk Gol. III menurun dari 5,6 menjadi 2,7 dan untuk Gol. IV dari 13,2 menjadi 8,2.

Dalam hal gaji tidak terdapat diskriminasi terhadap perempuan dan

mereka mendapat hak cuti hamil dan melahirkan. Namun dalam berbagai sektor terdapat diskriminasi dalam pengupahan, umpamanya sebagai buruh bangunan, karyawan perkebunan, dll.

Sebagai contoh pada upah perkebunan terdapat perbedaan yang cukup besar antara perempuan dan laki-laki. Pada pekerjaan pemilihan (*sorting*) perempuan menerima 64 persen dari apa yang diterima laki-laki dan pada pekerjaan panen sebesar 76,5 persen. Untuk semua pekerjaan perempuan menerima sebesar 73,1 persen dari yang diterima laki-laki (Tabel 9.). Diskriminasi terhadap perempuan dalam pengupahan ini dapat dikatakan merupakan masalah global yang perlu mendapat perhatian.

Aspek Sosial Budaya

Walaupun di dalam berbagai hal yang diuraikan di atas kemajuan yang dicapai perempuan ketinggalan dibandingkan dengan laki-laki namun kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh perempuan pada dekade-dekade belakangan ini cukup mengesankan. Kemajuan-kemajuan tersebut tidak terlepas dari konteks sosial budaya Indonesia di mana perempuan mendapat tempat yang relatif baik dibandingkan dengan berbagai negara yang sedang berkembang (lihat Stoler, 1982: 167). Berikut ini adalah cuplikan dari laporan Biro Pusat Statistik dan Unicef.

In a number of ways Indonesian women are more fortunate than those in many developing countries. They share the Southeast Asian tradition which has erected few formal barriers to woman's active participation in the affairs of every day life. In addition, legal and polticy

development in Indonesia has generally supported and extended the status and respect accorded to women by tradition. A number of women's organizations have been formed to promote the welfare of women and to channel their energies and skills for the betterment of Indonesia as a whole. (Central Bureau of Statistics and Unicef, 1984: 64)

Namun di Indonesia jelas terdapat variasi antardaerah dalam hal nilai-nilai sosial budaya dan hubungannya dengan variabel-variabel yang dibicarakan di muka. Dalam hal tingkat dan pola perubahan fertilitas, mortalitas, ketenagakerjaan, pendidikan, dan lain-lain terdapat perbedaan antardaerah yang cukup besar, yang tidak akan dibahas di sini.

Sebagai ilustrasi dapat disebutkan bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih tinggi dari daerah-daerah lainnya. Pada Supas 1985 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan adalah sebesar 37,6 pada tingkat nasional, sebesar 55 untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, 54 untuk Bali, dan 22,2 untuk DKI Jakarta. Total Fertility Rate (TFR) juga paling rendah di kedua propinsi tersebut (BPS, 1987 dan 1991b).

Kemajuan pendidikan membawa berbagai pengaruh bagi berbagai aspek kehidupan perempuan. Pendidikan perempuan membuka peluang baru bagi mereka untuk memasuki pasar kerja. Pertama, adalah alasan *opportunity cost*. Pendidikan merupakan suatu investasi dan pendidikan berkorelasi dengan pendapatan; pendidikan itu sendiri meningkatkan insentif untuk bekerja dan meningkatkan *opportunity*

cost of economic inactivity. Kedua, berkaitan dengan perubahan dalam aspirasi. Pendidikan meningkatkan aspirasi perempuan untuk meningkatkan pendapatan (Standing, 1978: 142-144).

Tentunya aspirasi tersebut dapat diperluas sehingga mencakup aspirasi untuk meningkatkan status sosial, memperluas pengalaman dan cakrawala hidup, dan juga menambah kemungkinan untuk mendapatkan suami yang berpendidikan. Selanjutnya aspirasi tersebut berkaitan pula dengan aspirasi orang tua yang meningkat tentang masa depan anaknya yang telah disekolahkan.

Kemajuan pendidikan perempuan dapat membawa berbagai pengaruh terhadap norma-norma sosial. Pertama adalah penundaan usia kawin. Kedua adalah berkurangnya kontrol orang tua terhadap pemilihan jodoh anaknya. Kawin karena keinginan sendiri berkembang menjadi norma baru, menggantikan perkawinan karena keinginan orang tua. Ketiga, mobilitas anak bertambah karena bersekolah di desa lain, kecamatan lain, ke kota dari desa, atau ke kota lain. Kombinasi dari kemajuan pendidikan, usia kawin yang meningkat, selisih umur suami dan isteri yang menyusut dan mobilitas yang lebih tinggi bagi perempuan kiranya meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan berbagai keputusan dalam rumah tangga.

Mengenai perempuan yang telah mengenyam pendidikan dan bekerja, pertanyaan klasik dapat diajukan. Apakah mereka tidak menanggung dua beban yang berat, yakni tugas mengurus rumah tangga (dan anak) dan tugas pekerjaan di luar rumah? Apakah sudah berkembang norma-norma baru, yakni suami lebih memperhatikan urusan anak

dan rumah tangga sehingga mengurangi beban isterinya yang bekerja di luar rumah? Kalau perempuan berperan ganda dianggap positif, baik untuk dirinya maupun untuk pembangunan pada umumnya, maka pelan-pelan suami juga harus mempersiapkan diri untuk berperan ganda, membantu isteri untuk berbagai urusan domestik (Budiman, 1990).

Peranan perempuan di sektor publik, apa lagi kepemimpinan perempuan di sektor publik, jelas jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan laki-laki. Umpamanya, perempuan yang menduduki jabatan struktural pada tahun 1990 hanya sebesar 5,5 persen di Indonesia dan selebihnya didominasi oleh laki-laki (*Tempo*, 23-11-1991). Namun bagaimanakah halnya dengan negara-negara sedang berkembang lainnya, terutama yang penduduknya mayoritas beragama Islam? Tidak mustahil Indonesia relatif menempati tempat yang baik. Proporsi anggota parlemen laki-laki dan perempuan dapat diambil sebagai contoh.

Di dalam Human Development Index 1991 yang diterbitkan untuk UNDP, indeks mengenai kepemimpinan yang dipakai adalah proporsi anggota parlemen perempuan. Untuk 100 anggota parlemen laki-laki berapakah anggota parlemen perempuan? Untuk negara-negara sedang berkembang sebagai keseluruhan (1988) angkanya adalah 15, negara-negara industri 22, dan dunia 17 (terhadap 100 anggota parlemen laki-laki).

Negara-negara sedang berkembang yang mempunyai angka tinggi adalah Kuba 51, Mongolia 33, Cina 27 dan Korea Utara 27; yang tergolong rendah adalah Uruguay 0, Lebanon 0, Uni Emirat Arab 0, Sudan 1, Yaman 2, Iran 2, Syria 2, Thailand 4, Singapura 4 dan

Malaysia 5. Indonesia 13, jauh lebih tinggi dari Malaysia dan Singapura dan sedikit lebih rendah dari rata-rata (15) untuk negara-negara sedang berkembang.

Untuk negara-negara industri negara-negara yang mempunyai nilai tinggi adalah USSR 53, Rumania 52, Norwegia 52. USA termasuk rendah dengan angka 6 (jauh lebih rendah dari Indonesia) tetapi yang paling rendah adalah Jepang dengan angka 1. Disebutkan dalam laporan tersebut bahwa Human Development Index untuk Jepang adalah yang tertinggi tetapi perbedaan antara laki-laki dan perempuan (*gender disparity*) sangat besar.

Dari angka-angka di atas dapat disimpulkan bahwa kemajuan pendidikan, ekonomi, dan tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja tidak berkorelasi dengan proporsi anggota parlemen perempuan. Nilai-nilai sosial budaya dan kultur politik lebih memberikan pengaruh dan aspek ini perlu sekali mendapat perhatian ilmuwan di Indonesia.

Kesimpulan

Indonesia mengalami kemajuan-kemajuan yang cukup pesat dalam pendidikan, penurunan fertilitas, penurunan mortalitas bayi, dan berbagai aspek ketenagakerjaan. Kemajuan tersebut dicapai berkat kemajuan di dalam program pemerintah di satu pihak dan dinamika masyarakat di lain pihak. Secara keseluruhan terdapat ketimpangan antara pencapaian dan kesempatan yang diperoleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki, umpamanya dalam pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Perlindungan hukum bagi buruh

perempuan juga perlu mendapat perhatian.

Namun apabila dilihat perubahan-perubahan yang terjadi selama dua dekade terakhir terdapat lonjakan-lonjakan dalam kemajuan yang dicapai perempuan, yang kadang-kadang laju perubahannya tidak kalah dari pria. Kemajuan-kemajuan tersebut tidak terlepas dari faktor sosial budaya. Partisipasi perempuan Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, seperti juga halnya negara-negara di Asia Tenggara, lebih besar daripada berbagai masyarakat sedang berkembang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarso, L. Ratna. 1988. "Kesakitan dan kematian balita pada survai kesehatan rumah tangga 1986", dalam Masri Singarimbun: *Kelangsungan hidup anak: berbagai teori, pendekatan dan kebijaksanaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 189-204.
- Budiman, Arief. 1990. "Pergeseran peran laki-laki dalam rumah tangga: suatu tinjauan sosiologis", makalah disampaikan pada *Seminar Sebari Peran Ganda Laki-laki dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, 5 Mei. Yogyakarta: Yayasan Annisa Swasti.
- Indonesia. Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional. 1990. "Lembaran data keluarga berencana nasional". Jakarta.
- Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 1989. *Rangkuman analisa situasi anak dan wanita di Indonesia*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF.
- Indonesia. Biro Pusat Statistik. 1978. *Buku saku statistik Indonesia 1977/1978*. Jakarta.

- . 1983. *Penduduk Indonesia, basil Sensus Penduduk 1980*. Seri S No. 2. Jakarta.
- . 1987. *Penduduk Indonesia, basil Survei Penduduk Antar Sensus 1985*. Seri Supas No. 5. Jakarta.
- . 1988. *Upah buruh menurut jenis pekerjaan*. Jakarta.
- . 1990. *Statistik Indonesia 1989*. Jakarta.
- . 1991a. *Statistik Indonesia 1990*. Jakarta.
- . 1991b. *Indikator kesejahteraan rakyat 1990*. Jakarta.
- . 1991c. *Ulasan singkat basil Sensus Penduduk 1990*. Jakarta.
- . 1991d. *Penduduk Indonesia: tabel pendahuluan basil sub-sampel Sensus Penduduk 1990*. Seri S No. 1. Jakarta.
- Indonesia. Biro Pusat Statistik. Bagian Analisa Statistik Sosial. 1989. *Indikator sosial wanita Indonesia*. Jakarta: Kerjasama Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Program Pengembangan Karir Wanita, YIIS, UNICEF dan Biro Pusat Statistik.
- Indonesia. Central Bureau of Statistics. 1984. *An analysis of the situation of children and women in Indonesia*. Jakarta: Central Bureau of Statistics and United Nations Children's Fund.
- Indonesia. Central Bureau of Statistics. 1991. *Indonesia, demographic and health survey 1991*. Jakarta: Central Bureau of Statistics, National Family Planning Coordinating Board, Ministry of Health and Demographic and Health Surveys, IRD/Macro International, Inc.
- Moore, Henrietta L. 1988. *Feminism and anthropology*. Cambridge: Polity Press.
- "Perempuan menerobos jabatan struktural". *Tempe*, 23 November 1991, hal. 101.
- Singarimbun, Masri. 1988. "Pencapaian program keluarga berencana di Indonesia", *Prisma*, 17(3): 3-15.
- Standing, Guy. 1978. *Labour force participation and development*. Geneva: International Labour Office.
- Tan, Mely G., ed. 1991. *Perempuan Indonesia: pemimpin masa depan?*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- United Nations Development Programme (UNDP). 1991. *Human Development Report 1991*. New York: Oxford University Press.
- Utomo, Budi. 1988. "Kematian bayi dan anak di Indonesia: beberapa implikasi kebijaksanaan", dalam Masri Singarimbun, ed., *Kelangsungan hidup anak: berbagai teori, pendekatan dan kebijaksanaan*". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 162-188.